

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2020**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MOJOKERTO
2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayahNya akhirnya Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 pasal 27 ayat (1) dan Permendagri No. 54 Tahun 2010 Passal 137, Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto merupakan substansi dari penjabaran Rencana Kerja Kota Mojokerto, berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Program Wajib Politik Dalam Negeri, rincian tugas pokok dan fungsi yang bersinergi dengan Program Pemerintah Kota Mojokerto. Rencana Kerja (Renja) disusun dengan maksud memberikan arah dan menyediakan data resmi atau pedoman dalam mewujudkan visi, misi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai pedoman kerja yang disampaikan melalui RKA dan DPA Tahun 2020.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja adalah untuk mengakomodir aspirasi maupun keinginan masyarakat agar dapat diwujudkan melalui program kegiatan tahunan dapat terfasilitasi, transparansi, efektif dan efisien untuk menuju tata pemerintahan yang baik (good governance) dan bertanggungjawab.

Akhirnya dengan segala keterbatasan kemampuan dan waktu penyusunan RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini, diharapkan kritik, saran dan masukan untuk perbaikan demi penyempurnaannya

Mojokerto, Juli 2019

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MOJOKERTO



ANANG FAHRUROJI, S.Sos,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670807 199203 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II. HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	7
2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	10
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	21
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	27
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	29
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	29
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	29
3.3. Program dan Kegiatan.....	30
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	36
BAB V. PENUTUP.....	38
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan pembangunan. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen Rencana Kerja yang disusun oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya guna mengoperasionalkan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk tahun rencana yang dimaksud. Renja Perangkat Daerah juga merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya.

Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan berdasarkan Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD ;

- b. Rumusan program kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib dan ataupun pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah ;
- c. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD ;
- d. Rumusan program kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib dan atau pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah ;
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kota Mojokerto berdasarkan pada perundang-undangan sebagai berikut :

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2014-2019;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah;
13. Perwali Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tupoksi Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kota Mojokerto.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Bakesbangpol adalah Rencana dan Program Kerja Tahunan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2020 adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang politik dan pelayanan masyarakat, sehingga tujuan program

dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan dapat tercapai.

2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Memberikan informasi kepada kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana kegiatan tahunan.
4. Menjadi kerangka dasar dan alat ukur kinerja pelayanan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2020 adalah :

1. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
3. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
4. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
5. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
6. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders).
7. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi masa depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2020 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1,1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen PD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kab/Kota serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun 2018) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2019), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Kota Mojokerto maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJAPERANGKATDAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto tahun lalu (tahun 2018) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2019) yang mengacu pada APBD tahun berjalan yang pada waktu penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun-tahun sebelumnya.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto tahun lalu dan realisasi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto dan/atau realisasi APBD, sebagaimana tabel T-C.29 berikut :

Tabel T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D
TAHUN 2018 KOTA MOJOKERTO

Kode OPD : 105.01
Nama OPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MOJOKERTO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2014- 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2017)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					OPD tahun 2018	Realisasi Renja OPD tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.1.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan penatausahaan perkantoran								
1.05.1.05.01.01.01	Pelayanan jasa surat menyurat	Jumlah jam lembur yang dilaksanakan sesuai rencana	5.940 jam	2.376 jam	1.188 jam	1.188 jam	100%	1.188 jam	4.752 jam	80%
1.05.1.05.01.01.02	Penyediaan jasa komuni- kasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon dan internet yang dibayarkan tepat waktu	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%

1.05.1.05.01.01.06	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	45	unit	27	unit	9	unit	9	unit	100%	9	unit	45	unit	100%
1.05.1.05.01.01.07	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Jumlah Pengelola Keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	45	orang	27	orang	9	orang	9	orang	100%	9	orang	45	orang	100%
1.05.1.05.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu	10	orang	6	orang	2	orang	2	orang	100%	2	orang	10	orang	100%
1.05.1.05.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	160	unit	96	unit	32	unit	32	unit	100%	32	unit	160	unit	100%
1.05.1.05.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan	210	macam	126	macam	42	macam	42	macam	100%	42	macam	210	macam	100%
1.05.1.05.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	40	macam	24	macam	8	macam	8	macam	100%	8	macam	40	macam	100%

1.05.1.05.01.01.12	Penyediaan komponen ins talasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	50	maca m	30	maca m	10	macam	10	maca m	100%	10	maca m	50	macam	100%
1.05.1.05.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan	10	maca m	6	maca m	2	macam	2	maca m	100%	2	maca m	10	macam	100%
1.05.1.05.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	140	maca m	84	maca m	28	macam	28	maca m	100%	28	maca m	140	macam	100%
1.05.1.05.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan	5.000	kotak	3.000	kotak	1.000	kotak	1.000	kota	100%	1.000	kotak	5.000	kotak	100%
1.05.1.05.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	990	kali	594	kali	198	kali	198	kali	100%	198	kali	990	kali	100%
1.05.1.05.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Daerah	Jumlah perjalanan dinas ke dalam daerah	825	kali	495	kali	165	kali	165	kali	100%	165	kali	825	kali	100%

1.05.1.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang optimal														
1.05.1.05.01.02.07	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional kantor	2	unit	0	unit	2	unit	2	unit	100%	0	unit	2	unit	100%
1.05.1.05.01.02.09	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor yang disediakan	4	unit	2	unit	0		0		0%	2	unit	4	unit	100%
1.05.1.05.01.02.10	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang disediakan	15	unit	8	unit	3	unit	3	unit	100%	4	unit	15	unit	100%
1.05.1.05.01.02.11	Pengadaan komputer dan kelengkapannya	Jumlah komputer dan kelengkapannya	12	unit	6	unit	2	unit	2	unit	100%	4	unit	12	unit	100%
1.05.1.05.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung/ kantor yang dipelihara	5	unit	3	unit	1	unit	1	unit	100%	1	unit	5	unit	100%
1.05.1.05.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor / tower yang dipelihara	30	unit	18	unit	6	unit	6	unit	100%	6	unit	30	unit	100%

1.05.01.05.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur									
1.05.1.05.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Meningkatnya disiplin aparatur	360 stel	216 stel	72 stel	72 stel	100%	72 stel	360 stel	100%	
1.05.1.05.01.06	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan									
1.05.1.05.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	5 dokumen	100%	
1.05.1.05.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	5 dokumen	100%	
1.05.1.05.01.15	Program : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan									
1.05.1.05.01.15.07	Pembinaan Kewilayahan	Jumlah peserta sosialisasi kepada	750 orang	450 orang	150 orang	150 orang	100%	150 orang	750 orang	100%	

		Lurah, trantib Kel, Babinsa dan Polmas tentang pembinaan kewilayahan								
1.05.1.05.01.17	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya kualitas pengembangan wawasan kebangsaan								
1.05.1.05.01.17.01	Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah Kelurahan yang mendapat pembinaan dari FKUB	90 Kel.	54 Kel.	18 Kel	18 Kel	100%	18 Kel	90 Kel	100%
1.05.1.05.01.17.02	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan	Jumlah Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama yang diberi sosialisasi rasa solidaritas di kalangan masyarakat	750 orang	450 orang	150 orang	150 orang	100%	150 orang	750 orang	100%
1.05.1.05.01.17.03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah siswa SMA/SMK/MAN yg mendapat pendidikan Bela Negara	2000 orang	1400 orang	500 orang	500 orang	100%	70 orang	1970 orang	99%
		Jumlah anggota Korsik yang di Diklat Korsik	125 orang	75 orang	25 orang	25 orang	100%	25 orang	125 orang	100%
1.05.1.05.01.17.05	Pemantapan Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah pembinaan yang dilakukan FPK	250 orang	150 orang	50 orang	50 orang	100%	50 orang	250 orang	100%
1.05.1.05.01.23	Program : Pembinaan dan	Meningkatnya								

	Pengembangan Kewaspadaan Nasional	kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan														
1.05.1.05.01.23.01	Pemantapan Kewaspadaan Nasional bagi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Komunitas Intelegen Daerah (Forkominda)	Jumlah peserta fasilitasi FKDM dan Forkominda	1000	orang	600	orang	200	orang	200	orang	100%	200	orang	1000	orang	100%
1.05.1.05.01.23.02	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Deteksi Dini Cegah Dini terhadap konflik di masyarakat	Jumlah peserta pendidikan tingkat dasar deteksi dini untuk mencegah disintegrasi bangsa	1500	orang	900	orang	300	orang	300	orang	100%	300	orang	1500	orang	100%
1.05.1.05.01.23.03	Pemantauan Kegiatan Orang Asing	Jumlah Kelurahan yang dipantau	85	orang	50	orang	17	Orang	17	orang	100%	17	orng	84	orang	99%
1.05.1.05.01.23.04	Penyusunan dan Pengumpulan data	Jumlah data yang dikumpulkan dan disusun	375	dok	225	dok	75	Dok	75	dok	100%	75	dok	375	dok	100%
	Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan	Jumlah masyarakat dan eselon IV, Guru/siswa negeri dan swasta/Organisasi wanita yang diberi pemantapan Nulai-nilai Kebangsaan	12375	orang	7425	orang	2475	Orang	2.475	orang	100%	2.475	orang	12375	orang	100%
	Prgram :															

1.05.1.05.01.21	Pendidikan Politik Masyarakat	Peningkatan kualitas pemahaman berpolitik														
1.05.1.05.01.21.01	Penyuluhan kepada Masyarakat	Jumlah Tomas/Toga yang diberi pembinaan tentang politik	500	orang	300	orang	100	orang	100	orang	100%	100	orang	500	orang	100%
1.05.1.05.01.21.02	Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik	Jumlah fungsionaris Partai Palotik, generasi muda dan mahasiswa	1750	orang	1050	orang	350	orang	350	orang	100%	350	orang	1750	orang	100%
1.05.1.05.01.21.02	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Partai Politik Pnerima bantuan Parpol	250	orang	150	orang	50	orang	50	orang	100%	50	orang	250	orang	100%
1.05.1.05.01.18	Program : Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan														
1.05.1.05.01.18.02	Seminar, Talk Show dan Diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah peserta talk show wawasan kebangsaan	2000	orang	1200	orang	400	orang	400	orang	100%	400	orang	2000	orang	100%
1.05.1.05.01.18.04	Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Upacara	Jumlah peserta tim fasilitasi dan koordiasi kegiatan upacara	180	orang	108	orang	36	orang	36	orang	100%	36	orang	180	orang	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah. Hasil analisis pencapaian kinerja pelayananBadan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto, sebagaimana tabelT-C.30 berikut

TABEL T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MOJOKERTO

NO.	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				Tahun 2017 (Tahun n-2)	Tahun 2018 (Tahun n-1)	Tahun 2019 (Tahun n)	Tahun 2020 (Tahun n+1)	TAHUN 2017 (TAHUN n-2)	TAHUN 2018 (TAHUN n-1)	TAHUN 2019 (Tahun n)	TAHUN 2020 (TAHUN n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan			90 %	0	95 %	0	90 %	0	95 %	0	
1	Persentase pembinaan terhadap elemen masyarakat tentang wawasan kebangsaan		Jumlah peserta sosialisasi kepada lurah, trantib kelurahan, Babinsa dan Polmas ttg pembinaan kewilayahan	100 orang	0	20 Kali	0	100 orang	0	20 kali	0	
II	Meningkatnya kualitas pengembangan wawasan kebangsaan			90 %	92 %	95 %	95,5 %	90 %	92 %	95 %	95,5 %	

1	Persentase Kelurahan dalam keadaan kondusif		Jumlah kelurahan yang mendapat pembinaan dari FKUB	12 bulan	12 bulan	18 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
2	Persentase tetap terjaganya kerukunan antar warga masyarakat		Jumlah tokoh masyarakat, tokoh agama yang diberi sosialisasi rasa solidaritas di kalangan masyarakat	100 orang	100 orang	100 Orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	
3	Persentase guru yang dapat menyampaikan nilai-nilai luhur budaya bangsa		Jumlah guru yang memahami nilai-nilai luhur budaya bangsa	100 orang	100 orang	100 Orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	
4	Persentase kerukunan antar suku /etnis ang sudah dapat membaur		Jumlah pembinaan yang dilakukan FPK	4 kali	4 kali	4 Kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	
5	Persentase perubahan sikap		Jumlah pondok pesantren yang diberi sosialisasi tentang wawasan kebangsaan	0	100 orang	100 Orang	100 orang	0	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	
III	Meningkatnya kemitraan pengembangan wawasan			90 %	92 %	95 %	95,5 %	90 %	92 %	95 %	95,5 %		

	kebangsaan																		
1	Persentase peserta talk show yang merubah sikap		Jumlah peserta talk show wawasan kebangsaan	100	orang	100	orang	100	Orang	0	100	orang	100	orang	0				
2	Persentase fasilitasi dan koordinasi kegiatan upacara		Jumlah petugas fasilitasi dan koordinasi kegiatan upacara	144	orang	144	orang	144	Orang	144	orang	144	orang	144	orang				
IV	Meningkatnya kualitas pendidikan politik masyarakat			85	%	87	%	90	%	90,5	%	85	%	87	%	90	%	90,5	%
1	Persentase menurunnya masyarakat yang terlibat dalam money politik		Jumlah Tomas/Toga yang diberi pembinaan tentang politik	100	orang	100	orang	100	Orang	37	kali	100	orang	100	orang	100	orang	37	kali
2	Persentase fungsionaris Parpol yang mampu menjaga stabilitas politik daerah		Jumlah fungsionaris partai politik daerah	100	orang	100	orang	100	Orang	3	kali	100	orang	100	orang	100	orang	3	kali
3	Persentase validasi dan verifikasi bantuan keuangan Parpol dan pemantauan perkembangan politik yang dilaksanakan tepat waktu		Jumlah Partai Politik penerima Bantuan Keuangan Parpol	50	orang	50	orang	50	Orang	4	laporan	50	orang	50	orang	50	orang	4	laporan

V	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengembangan kewaspadaan nasional			90 %	92 %	95 %	95,5 %	90 %	92 %	95 %	95,5 %	
1	Persentase kegiatan FKDM dan Forkominda yang diselesaikan dengan situasi aman dan tentram serta menurunnya angka kriminalitas	Jumlah peserta sosialisasi	200 orang	200 orang	200 Orang	14 kali	200 orang	200 orang	200 orang	14 kali		
2	Persentase kemampuan peserta pendidikan tingkat dasar deteksi dini untuk mencegah disintegrasi bangsa	Jumlah peserta pendidikan tingkat dasar deteksi dini untuk mencegah disintegrasi bangsa	300 orang	300 orang	300 Orang	13 kali	300 orang	300 orang	300 orang	13 kali		
3	Persentase Kelurahan yang dipantau	Jumlah kelurahan yang dipantau	18 Kel.	18 Kel.	18 Kel.	18 Kel.	18 Kel.	18 Kel.	18 Kel.	18 Kel.		
4	Persentase dokumen keuangan akhir tahun yang disusun dengan benar dan tepat	Jumlah data yang dikumpulkan dan disusun	3 dokumen	3 dokumen	3 Dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen		
5	Persentase pemahaman nilai-nilai kebangsaan sesuai dengan rencana	Jumlah masyarakat dan eselon IV, guru	2300 orang	2300 orang	2300 Orang	2300 orang	2300 orang	2300 orang	2300 orang	2300 orang		

			siswa negeri dan swasta/orga nisasi wanita yang diberi pemantapan nilai-nilai kebangsaan										
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesatuan bangsa dan politik tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bakesbangpol meliputi SDM, sarana dan prasarana serta system perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi :

1. Memberdayakan kebhinekaan Indonesia dan peningkatan pemahaman etika kebangsa dan bernegara;
2. Memelihara dan menghormati komunitas kehidupan politik yang berorientasi pada pengembangan masyarakat madani yang di cita-citakan ;
3. Memelihara kewaspadaan nasional agar terhindar dari upaya pemecahbelahan bangsa (disintegrasi bangsa) ;
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban ;
5. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pendidikan politik yang berkesinambungan ;
6. Mengembangkan kreatifitas masyarakat dengan memberikan dorongan kearah kehidupan politik yang menghormati HAM, berkeadilan, bertanggungjawab dan mampu berkompetisi secara sehat dan dinamis.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam upaya mewujudkan misi ketentraman dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum, maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagaimana tabel T-C.31 berikut :

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah tahun 2020 Kota Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto

No.	Rancangan Awal Perangkat Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Pengembangan wawasan kebangsaan	Balongsari	Persentase aparatur & masyarakat yg mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan Persentase aparatur & masyarakat yg mengikuti pembinaan ideologi	95%	960.832.030,00	II. Program Pengembangan wawasan kebangsaan	Balongsari	Persentase aparatur & masyarakat yg mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan Persentase aparatur & masyarakat yg mengikuti pembinaan ideologi	95%	960.832.030,00	
1	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Balongsari	Jumlah peserta Bela Negara, cerdas cermat	160 orang	105.841.750,00	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Balongsari	Jumlah peserta Bela Negara, cerdas cermat	160 orang	105.841.750,00	
2	Pemantapan nilai-nilai kebangsaan	Balongsari	Jumlah peserta aktualisasi ideologi Pancasila	100 orang	62.793.500,00	Pemantapan nilai-nilai kebangsaan	Balongsari	Jumlah peserta aktualisasi ideologi Pancasila	100 orang	62.793.500,00	
3	Fasilitasi dan koordinasi kegiatan upacara	Balongsari	Jumlah upacara rutin, hari besar nasional, HUT Kemerdekaan RI, hari jadi Kota, hari santri, pelatihan korsik & pejabat upacara	23 kali	619.270.680,00	Fasilitasi dan koordinasi kegiatan upacara	Balongsari	Jumlah upacara rutin, hari besar nasional, HUT Kemerdekaan RI, hari jadi Kota, hari santri, pelatihan korsik & pejabat upacara	23 kali	619.270.680,00	
4	Pendidikan wawasan kebangsaan	Balongsari	Jumlah peserta pendidikan wawasan kebangsaan	217 orang	172.926.100,00	Pendidikan wawasan kebangsaan	Balongsari	Jumlah peserta pendidikan wawasan kebangsaan	217 orang	172.926.100,00	

II	Program Pendidikan politik masyarakat	Balongsari	Persentase Parpol penerima hibah yg menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku	90%	718.081.000,00	IV. Program Pendidikan politik masyarakat	Balongsari	Persentase Parpol penerima hibah yg menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku	90%	718.081.000,00	
			Persentase ORMAS/LSM/PARPOL yg terdaftar dan aktif					Persentase ORMAS/LSM/PARPOL yg terdaftar dan aktif			
1	Penyuluhan kepada masyarakat	Balongsari	Jumlah peserta Desentralisasi UU Politik, Sosialisasi pemahaman demokrasi bagi pelajar.	37 kali	110.000.000,00	Penyuluhan kepada masyarakat	Balongsari	Jumlah peserta Desentralisasi UU Politik, Sosialisasi pemahaman demokrasi bagi pelajar.	37 kali	110.000.000,00	
2	Koordinasi forum diskusi politik	Balongsari	Jumlah peserta Forum diskusi Politik, BinteK bantuan keuangan Parpol, FGD penguatan etika dan budaya politik demokratis.	3 kali	180.000.000,00	Koordinasi forum diskusi politik	Balongsari	Jumlah peserta Forum diskusi Politik, BinteK bantuan keuangan Parpol, FGD penguatan etika dan budaya politik demokratis.	3 kali	180.000.000,00	
3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Balongsari	Jumlah dokumen laporan pemantauan perkembangan politik, dokumen verifikasi bantuan keuangan Parpol.	4 laporan	35.000.000,00	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Balongsari	Jumlah dokumen laporan pemantauan perkembangan politik, dokumen verifikasi bantuan keuangan Parpol.	4 laporan	35.000.000,00	
4	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	Balongsari	Jumlah peserta sarasehan, Gelar kreativitas ORMAS, Jmbore ORMAS, FGD ORMAS, Talkshow media elektronik, media luar ruang, Rakor Tim verifikasi ORMAS.	370 orang	393.081.000,00	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	Balongsari	Jumlah peserta sarasehan, Gelar kreativitas ORMAS, Jmbore ORMAS, FGD ORMAS, Talkshow media elektronik, media luar ruang, Rakor Tim verifikasi ORMAS.	370 orang	393.081.000,00	

III	Program Pembinaan dan pengembangan kewaspadaan nasional	Balongsari	Persentase orang asing, tenaga kerja asing/lembaga asing yang beraktfitas secara ilegal di Kota Mojokerto	95%	1.823.566.170,00	V. Program Pembinaan dan pengembangan kewaspadaan nasional	Balongsari	Persentase orang asing, tenaga kerja asing/lembaga asing yang beraktfitas secara ilegal di Kota Mojokerto	95%	1.823.566.170,00	
			Persentase kasus/kejadian potensi konflik yang ditangani					Persentase kasus/kejadian potensi konflik yang ditangani			
1	Pemantapan kewaspadaan nasional	Balongsari	Jumlah peserta Rakor FKDD & FKDM, Media luar ruang, Fasilitas P4GN, pemantauan kegiatan orang asing, Fasilitas ketahanan bangsa.	415 orang	650.000.000,00	5. Pemantapan kewaspadaan nasional	Balongsari	Jumlah peserta Rakor FKDD & FKDM, Media luar ruang, Fasilitas P4GN, pemantauan kegiatan orang asing, Fasilitas ketahanan bangsa.	415 orang	650.000.000,00	
2	Pembinaan Kewilayahan	Balongsari	Jumlah peserta Rakor Timdu PKS, silaturahmi Forkopimda, studi komparasi, pengamanan wilayah.	520 orang	811.448.420,00	6. Pembinaan Kewilayahan	Balongsari	Jumlah peserta Rakor Timdu PKS, silaturahmi Forkopimda, studi komparasi, pengamanan wilayah.	520 orang	811.448.420,00	
3	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Balongsari	Jumlah peserta Rakor DP & pengurus FKUB, Rakor Tim Instruksi, Dialog FKUB	346 orang	200.000.000,00	7. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Balongsari	Jumlah peserta Rakor DP & pengurus FKUB, Rakor Tim Instruksi, Dialog FKUB	346 orang	200.000.000,00	
4	Pemantapan Forum Pembauran Kebangsaan	Balongsari	Jumlah peserta Rakor DP & pengurus FPK, Dialog FPK	400 orang	162.117.750,00	8. Pemantapan Forum Pembauran Kebangsaan	Balongsari	Jumlah peserta Rakor DP & pengurus FPK, Dialog FPK	400 orang	162.117.750,00	
III	XI. Program pelayanan kesekretariatan	Balongsari	Persentase realisasi anggaran	100%	1.006.395.700,00	XI. Program pelayanan kesekretariatan	Balongsari	Persentase realisasi anggaran	100%	1.006.395.700,00	
			Persentase capaian kinerja					Persentase capaian kinerja			
1	Pelayanan administrasi perkantoran	Balongsari	Jumlah rekening telepon dan internet yang dibayarkan tepat waktu	12 bulan	65.400.000,00	Pelayanan administrasi perkantoran	Balongsari	Jumlah rekening telepon dan internet yang dibayarkan tepat waktu	12 bulan	65.400.000,00	

			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	11 unit	93.060.000,00		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	11 unit	93.060.000,00	
			Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	10 orang	76.943.250,00		Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	10 orang	76.943.250,00	
			Jumlah petugas kebersihan dan sopir yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	4 orang	86.720.000,00		Jumlah petugas kebersihan dan sopir yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	4 orang	86.720.000,00	
			Jumlah peralatan kerja kantor yang diparbaiki	47 unit	21.000.000,00		Jumlah peralatan kerja kantor yang diparbaiki	47 unit	21.000.000,00	
			Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	27 unit	21.739.500,00		Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	27 unit	21.739.500,00	
			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 macam	27.656.400,00		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 macam	27.656.400,00	
			Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	11 macam	3.638.050,00		Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	11 macam	3.638.050,00	
			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibaca/ dimanfaatkan	2 macam	13.390.000,00		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibaca/ dimanfaatkan	2 macam	13.390.000,00	
			Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	37 macam	5.000.000,00		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	37 macam	5.000.000,00	
			Jumlah makan dan minum kantor yang disediakan	1200 kotak	21.000.000,00		Jumlah makan dan minum kantor yang disediakan	1200 kotak	21.000.000,00	
			Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah	12 bulan	253.525.000,00		Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah	12 bulan	253.525.000,00	

2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Balongsari	Jumlah perlengkapan gedung kantor	6 unit	65.000.000,00	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Balongsari	Jumlah perlengkapan gedung kantor	6 unit	65.000.000,00	
			Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	10 unit	35.000.000,00			Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	10 unit	35.000.000,00	
			Jumlah kebutuhan komputer dan kelengkapannya	4 unit	36.000.000,00			Jumlah kebutuhan komputer dan kelengkapannya	4 unit	36.000.000,00	
			Jumlah gedung/kantor yang dipelihara	1 unit	60.000.000,00			Jumlah gedung/kantor yang dipelihara	1 unit	60.000.000,00	
			Jumlah petugas keamanan rumah jabatan/dinas/gedung kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	2 orang	44.496.000,00			Jumlah petugas keamanan rumah jabatan/dinas/gedung kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	2 orang	44.496.000,00	
			Jumlah pakaian khusus	60 potong	19.827.500,00			Jumlah pakaian khusus	60 potong	19.827.500,00	
3	Pengelolaan administrasi keuangan	Balongsari	Jumlah laporan keuangan (Neraca, CALK, LRA, RKA, RKAP, DPA, DPAP)	7 dokumen	7.000.000,00	Pengelolaan administrasi keuangan	Balongsari	Jumlah laporan keuangan (Neraca, CALK, LRA, RKA, RKAP, DPA, DPAP)	7 dokumen	7.000.000,00	
4	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	Balongsari	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (RENSTRA, RENJA, RENJA Perubahan, LPPD, LKPJ, SAKIP, PK, RTP, Lap. Kinerja, SPIP, Sinovik, SOP)	12 dokumen	40.000.000,00	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	Balongsari	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (RENSTRA, RENJA, RENJA Perubahan, LPPD, LKPJ, SAKIP, PK, RTP, Lap. Kinerja, SPIP, Sinovik, SOP)	12 dokumen	40.000.000,00	
5	Pengembangan data dan sistem informasi	Balongsari	Jumlah buku Profil yang disusun	10 buku	10.000.000,00	Pengembangan data dan sistem informasi	Balongsari	Jumlah buku Profil yang disusun	10 buku	10.000.000,00	
Jumlah					4.508.874.900,00					4.508.874.900,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program/kegiatan yang diperoleh dari hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020, tidak ada program/kegiatan yang diusulkan dari pemangku pimpinan (stakeholder) baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan , LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kota Mojokerto.

Hasil pengerjaan pada bagian penelaah usulan program dan kegiatan dari masyarakat, sebagaimana tabel T-C 32 berikut :

T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020
Kota Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Mojokerto

No.	program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol adalah :

1. Program Pengembangan Wawasan kebangsaan
2. Program Pendidikan Politik masyarakat
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

Visi pembangunan daerah Kota Mojokerto untuk periode 2018 - 2023 sesuai dengan visi Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat”

Untuk mewujudkan visi Pembanguna Kota Mojokerto yang telah ditetapkan, maka Bakesbangpol Kota Mojokerto sesuai **Misi 5** dari Misi Pembangunan Kota Mojokerto 2018 – 2023 sebagai berikut:

“Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka integrasi nasional pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila”

Berdasarkan misi yang telah dirumuskan di atas, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan :

“Meningkatkan kesalehan sosial”

Sasaran :

1. Memperkuat Ketahanan Sosial Masyarakat.
2. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Bakesbangpol Kota Mojokerto yang tertuang dalam Review Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018 – 2023 merupakan serangkaian langkah dari penjabaran strategi – strategi yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran. Rencana program kerja ini akan menjadi pegangan dan acuan Bakesbangpol dalam melakukan kegiatan perencanaan pembangunan Kota Mojokerto dengan lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto pada tahun 2020 mempunyai program kerja yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Kesekretariatan

Kegiatan :

- Pelayanan administrasi perkantoran
- Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Pengelolaan administrasi keuangan
- Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja

2. Program Pengembangan wawasan kebangsaan

Kegiatan :

- Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
- Pemantapan nilai-nilai kebangsaan
- Fasilitasi dan koordinasi kegiatan upacara
- Pendidikan wawasan kebangsaan

3. Program Pendidikan politik masyarakat

Kegiatan :

- Penyuluhan kepada masyarakat
- Koordinasi forum diskusi politik
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat.

4. Program Pembinaan dan pengembangan kewaspadaan nasional

Kegiatan :

- Pemantapan kewaspadaan nasional
- Pembinaan kewilayahan

- Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
- Pemantapan Forum Pembauran Kebangsaan

Tabel Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33, sebagaimana tabel berikut :

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kota Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	6	7	14	15		20	24	25	29
1.05.01.17	Program Pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase aparatur & masyarakat yg mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan Persentase aparatur & masyarakat yg mengikuti pembinaan ideologi	Balongsari	95,5%	960.832.030,00	APBD		95,5%	1.008.873.631,50
1.05.01.17.03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah peserta Bela Negara, cerdas cermat	Balongsari	160 orang	105.841.750,00	APBD		160 orang	111.133.837,50
1.05.01.17.09	Pemantapan nilai-nilai kebangsaan	Jumlah peserta aktualisasi ideologi Pancasila	Balongsari	100 orang	62.793.500,00	APBD		100 orang	65.933.175,00
1.05.01.17.07	Fasilitasi dan koordinasi kegiatan upacara	Jumlah upacara rutin, hari besar nasional, HUT Kemerdekaan RI, hari jadi Kota, hari santri, pelatihan korsik & pejabat upacara	Balongsari	23 kali	619.270.680,00	APBD		23 kali	650.234.214,00
1.05.01.17.08	Pendidikan wawasan kebangsaan	Jumlah peserta pendidikan wawasan kebangsaan	Balongsari	217 orang	172.926.100,00	APBD		217 orang	181.572.405,00

1.05.01.21	Program Pendidikan politik masyarakat	Persentase Parpol penerima hibah yg menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku	Balongsari	90,5%	718.081.000,00	APBD		90,5%	753.965.050,00
		Persentase ORMAS/LSM/PARPOL yg terdaftar dan aktif							
1.05.01.21.01	Penyuluhan kepada masyarakat	Jumlah peserta Desentralisasi UU Politik, Sosialisasi pemahaman demokrasi bagi pelajar.	Balongsari	1650 orang	110.000.000,00	APBD		1650 orang	115.500.000,00
1.05.01.21.03	Koordinasi forum diskusi politik	Jumlah peserta Forum diskusi Politik, Bintek bantuan keuangan Parpol, FGD penguatan etika dan budaya politik demokratis.	Balongsari	360 orang	180.000.000,00	APBD		360 orang	189.000.000,00
1.05.01.21.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen laporan pemantauan perkembangan politik, dokumen verifikasi bantuan keuangan Parpol.	Balongsari	12 dokumen	35.000.000,00	APBD		12 dokumen	36.750.000,00
1.05.01.21.06	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	Jumlah peserta sarasehan, Gelar kreativitas ORMAS, Jmbore ORMAS, FGD ORMAS, Talkshow media elektronik, media luar ruang, Rakor Tim verifikasi ORMAS.	Balongsari	370 orang	393.081.000,00	APBD		370 orang	412.715.050,00
1.05.01.23	Program Pembinaan dan pengembangan kewaspadaan nasional	Persentase orang asing, tenaga kerja asing/lembaga asing yang beraktifitas secara ilegal di Kota Mojokerto	Balongsari	95,5%	1.823.566.170,00	APBD		95,5%	1.914.744.478,50
		Persentase kasus/kejadian potensi konflik yang ditangani							

1.05.01.23.07	Pemantapan kewaspadaan nasional	Jumlah peserta Rakor FKDD & FKDM, Media luar ruang, Fasilitas P4GN, pemantauan kegiatan orang asing, Fasilitas ketahanan bangsa.	Balongsari	415 org	650.000.000,00	APBD		415 org	682.500.000,00
1.05.01.23.08	Pembinaan Kewilayahan	Jumlah peserta Rakor Timdu PKS, silaturahmi Forkopimda, studi komparasi, pengamanan wilayah.	Balongsari	520 org	811.448.420,00	APBD		520 org	852.020.841,00
1.05.01.23.09	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah peserta Rakor DP & pengurus FKUB, Rakor Tim Instruksi, Dialog FKUB	Balongsari	346 orang	200.000.000,00	APBD		346 orang	210.000.000,00
1.05.01.23.10	Pemantapan Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah peserta Rakor DP & pengurus FPK, Dialog FPK	Balongsari	400 org	162.117.750,00	APBD		400 org	170.223.637,50
1.05.01.12	Program pelayanan kesekretariatan	Persentase realisasi anggaran	Balongsari	100%	1.006.395.700,00	APBD		1,00	1.081.579.210,00
		Persentase capaian kinerja							
1.05.01.12.01	Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah rekening telepon dan internet yang dibayarkan tepat waktu	Balongsari	12 bulan	65.400.000,00	APBD		12 bulan	68.670.000,00
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	Balongsari	11 unit	93.060.000,00	APBD		11 unit	97.713.000,00
		Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Balongsari	10 orang	76.943.250,00	APBD		10 orang	80.790.412,50
		Jumlah petugas kebersihan dan sopir yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Balongsari	4 orang	86.720.000,00	APBD		4 orang	91.056.000,00
		Jumlah peralatan kerja kantor yang diparbaiki	Balongsari	47 unit	21.000.000,00	APBD		47 unit	22.050.000,00
		Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Balongsari	27 unit	21.739.500,00	APBD		27 unit	22.826.475,00
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Balongsari	8 macam	27.656.400,00	APBD		8 macam	29.039.220,00

		Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Balongsari	11 macam	3.638.050,00	APBD		11 macam	3.819.952,50
		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibaca/ dimanfaatkan	Balongsari	2 macam	13.390.000,00	APBD		2 macam	14.059.500,00
		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Balongsari	37 macam	5.000.000,00	APBD		37 macam	5.250.000,00
		Jumlah makan dan minum kantor yang disediakan	Balongsari	1200 kotak	21.000.000,00	APBD		1200 kotak	22.050.000,00
		Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah	Balongsari	12 bulan	253.525.000,00	APBD		12 bulan	266.201.250,00
1.05.01.12.02	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Balongsari	6 unit	65.000.000,00	APBD		6 unit	85.000.000,00
		Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	Balongsari	10 unit	35.000.000,00	APBD		10 unit	40.000.000,00
		Jumlah kebutuhan komputer dan kelengkapannya	Balongsari	4 unit	36.000.000,00	APBD		4 unit	40.000.000,00
		Jumlah gedung/kantor yang dipelihara	Balongsari	1 unit	60.000.000,00	APBD		1 unit	66.950.000,00
		Jumlah petugas keamanan rumah jabatan/dinas/gedung kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Balongsari	2 orang	44.496.000,00	APBD		2 orang	45.830.900,00
		Jumlah pakaian khusus	Balongsari	60 potong	19.827.500,00	APBD		60 potong	20.422.500,00
1.05.01.12.03	Pengelolaan administrasi keuangan	Jumlah laporan keuangan (Neraca, CALK, LRA, RKA, RKAP, DPA, DPAP)	Balongsari	7 dokumen	7.000.000,00	APBD	-	7 dokumen	7.350.000,00
1.05.01.12.04	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (RENSTRA, RENJA, RENJA Perubahan, LPPD, LKPI, SAKIP, PK, RTP, Lap. Kinerja, SPIP, Sinovik, SOP)	Balongsari	12 dokumen	40.000.000,00	APBD		12 dokumen	42.000.000,00
1.05.01.12.05	Pengembangan data dan sistem informasi	Jumlah buku Profil yang disusun	Balongsari	10 buku	10.000.000,00	APBD		10 buku	10.500.000,00
					4.508.874.900,00				4.759.162.370,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto pada tahun 2020, Rencana kerja dan pendanaan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemahaman kesatuan bangsa.

Program yang dilakukan pada urusan kesatuan bangsa adalah :

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, kegiatannya :

- Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dengan pendanaan Rp. 105.841.750,-
- Pemantapan nilai-nilai kebangsaan, dengan pendanaan Rp. 62.793.500,-
- Fasilitasi dan koordinasi kegiatan upacara, dengan pendanaan Rp. 619.270.680,-
- Pendidikan wawasan kebangsaan, dengan pendanaan Rp. 172.926.100,-

2. Mewujudkan stabilitas ketahanan bangsa dan kewaspadaan nasional.

Program yang dilakukan pada ketahanan bangsa dan kewaspadaan nasional adalah :

Program Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Nasional, kegiatannya :

- Pemantapan kewaspadaan nasional, dengan pendanaan Rp. 650.000.000,-
- Pembinaan kewilayahan, dengan pendanaan Rp. 811.448.420,-
- Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, dengan pendanaan Rp. 200.000.000,-
- Pemantapan Forum Pembauran Kebangsaan, dengan pendanaan Rp. 162.117.750,-

3. Mewujudkan kesadaran politik masyarakat dalam berdemokrasi.

Program yang dilakukan pada kesadaran politik adalah :

Program Pendidikan Politik Masyarakat, kegiatannya :

- Penyuluhan Kepada Masyarakat, dengan pendanaan Rp. 110.000.000,-

- Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik, dengan pendanaan Rp. 180.000.000,-
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan pendanaan Rp. 35.000.000,-
 - Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat, dengan pendanaan Rp. 393081000,-
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas
- Program yang dilakukan pada urusan manajemen adalah :
- Program Pelayanan kesekretariatan, kegiatannya :
- Pelayanan administrasi perkantoran, dengan pendannaan Rp. 689.072.200,-
 - Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan pendanaan Rp. 260.323.500,-
 - Pengelolaan administrasi keuangan, dengan pendanaan Rp. 7.000.000,-
 - Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, dengan pendanaan Rp. 40.000.000,-
 - Pengembangan data dan sistem informasi, dengan pendanaan Rp. 10.000.000,-

BAB V

PENUTUP

a. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2020 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Kota Mojokerto Tahun 2020. Selain itu Renja juga sebagai landasan operasional perencanaan tahunan bagi Dinas/Badan/Lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah , tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

Renja merupakan dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, disiplin, bekerja efisien dan efektif.

b. Kaidah – kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan Renja Bakesbangpol Kota Mojokerto Tahun 2020 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan program kegiatan yang berkualitas dan profesional serta ditunjang dengan Sumber Daya Manusia yang baik. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan tahun 2020, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Kerja sebagai dasar atau pedoman kerja dan sebagai arah kebijakan dalam pagu anggaran program kegiatan yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi secara terakomodir baik secara internal maupun external dalam waktu tertentu (jangka waktu 1 (satu) tahun).

2. Rencana Kerja disusun menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 pasal 27 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 pasal 37.
3. Rencana Kerja merupakan dokumen Rencana Kerja sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Rencana Kerja disusun sebagai pedoman dan bahan pada RKA dan DPA Tahun 2020.
5. Renja Bakesbangpol Kota Mojokerto Tahun 2020 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antara sekretariat dan bidang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja merupakan proses pemikiran yang berdasarkan program dan kegiatan dan tindak lanjut dari kebijakan yang ingin dicapai melalui rumusan visi, misi tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas pelaksanaan dalam kurun waktu satu tahun, yang merupakan Rencana Kerja Tahunan yang diakomodir dari usulan Musrenbang tingkat kelurahan, Kecamatan dan Kota Mojokerto yang disesuaikan dengan Program kegiatan unggulan Kota Mojokerto tahun 2020, serta pengambil kebijakan kedepannya.

Berdasarkan komitmen tersebut dapat diimplementasikan dengan langkah sebagai berikut :

1. Dalam penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu yang diimplementasikan sesuai dengan pedoman petunjuk pelaksanaan baik berdasarkan perundang-undangan maupun Peraturan Pemerintah, Lembaga ataupun Non Pemerintah.
2. Terwujudnya fungsi koordinasi dalam menyikapi, mengantisipasi maupun penanganan bersama instansi terkait dan forum-forum yang ada dilakukan koordinasi secara cepat dan tepat.

3. Bekerjasama secara terpadu sebelum pada saat kejadian dan pasca terjadinya konflik.
4. Perlu peningkatan SDM Aparatur, forum-forum maupun lembaga non Pemerintah yang dibentuk melalui pendidikan SDM dengan Daerah/Provinsi lainnya khususnya aparatur melalui pendidikan, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang merupakan penguatan dan peningkatan kinerja.
5. Melakukan koordinasi, harmonisasi, kerjasama secara internal bersama seluruh Bidang-bidang maupun Sub Bidang dan Sub Bagian guna mewujudkan perencanaan maupun penganggaran yang transparansi dan terwujud.
6. Tetap melakukan koordinasi dengan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dengan membandingkan tahun sebelumnya dengan tahun berjalan.

Dengan demikian, hasil dari perencanaan kegiatan pembangunan pada akhirnya akan dapat dirasakan dan dinikmati secara lebih adil dan merata terutama bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Mojokerto.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MOJOKERTO



ANANG FAHROKJI, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670807 199203 1 005